



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING  
DI KABUPATEN BLORA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan penulisan Skripsi Program  
Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

**Ahmad Arifin**  
**NPM 211003742018720**

**SEMARANG**  
**2025**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI *ILLEGAL LOGGING*  
DI KABUPATEN BLORA**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

**Ahmad Arifin**  
**NPM : 211003742018720**

Mengesahkan  
Tim Penguji  
Ketua

Agnes Maria Janni Widyawati, SH., M.H.  
NIDN : 0625016402

Anggota

DR. Sri Purwaningsih, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0627115801

Anggota

DR. Aniek Tyaswati WL, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0602126201

Mengetahui  
Dekan



Prof. DR. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0627076301

SEMARANG  
2025

## ABSTRAK

Illegal logging adalah salah satu ancaman terbesar bagi kelestarian hutan di Indonesia, yang berdampak pada kerusakan ekosistem, penurunan keanekaragaman hayati, dan ketidakstabilan sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan. Kabupaten Blora, sebagai wilayah dengan luas hutan terbesar di Jawa Tengah, menghadapi tingkat kerawanan yang tinggi terhadap aktivitas ini. Illegal logging tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga menimbulkan kerugian besar bagi negara. Dalam empat tahun terakhir, aktivitas ini menyebabkan kerugian hingga Rp 140 juta. Kepolisian memiliki peran strategis dalam memberantas illegal logging melalui penegakan hukum, patroli, sosialisasi, dan mediasi konflik terkait sumber daya hutan. Namun, tugas ini tidak berjalan tanpa hambatan. Kendala seperti keterbatasan personel, anggaran yang minim, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan sulitnya akses ke wilayah terpencil sering menghambat efektivitas upaya pemberantasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat kepolisian Polres Blora dan didukung oleh studi dokumen hukum terkait.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberantasan illegal logging memerlukan sinergi antara kepolisian, masyarakat, dan pemerintah. Upaya kolaboratif ini mencakup penguatan kapasitas kepolisian, peningkatan koordinasi antar-lembaga, dan edukasi masyarakat untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, pemberantasan illegal logging tidak hanya melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

**Kata kunci:** *Illegal Logging*, Pemberantasan Hutan, Peran Kepolisian